

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia tidak terlepas dari berbagai masalah ketenagakerjaan. Beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia salah satunya adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2018 mencapai 133,94 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 2,39 juta jiwa dibandingkan keadaan pada Februari 2017. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja di dalam pasar bertambah, namun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,87 juta jiwa.

Keadaan pasar tenaga kerja di Indonesia juga hampir sama terjadi di Sumatera Barat, meskipun dengan proporsi yang berbeda. Angkatan kerja di Sumatera Barat pada bulan tahun 2018 mencapai 2.410.450 jiwa atau bertambah 65.478 jiwa atau naik sebesar 2,8 persen dari tahun 2017. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau (TPAK) naik sebesar 2,38 poin, dengan angka diatas dapat dilihat bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja di Sumatera Barat mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang menganggur dan berbondong untuk mendapatkan pekerjaan.

Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.1 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.1. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Tenaga Kerja (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2013	2.061.109	-1,1
2014	2.180.336	5,7
2015	2.184.599	0,1
2016	2.347.911	7,4
2017	2.344.972	-0,1
2018	2.410.450	2,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumbar Tahun 2019

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadinya peningkatan Tenaga Kerja di Sumatera Barat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, dimana pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja sebesar 2.061.109 Jiwa, dan terus meningkat sampai pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan dari 2.347.911 jiwa pada tahun 2016 menjadi 2.344.972 pada tahun 2017, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 2,8 persen atau menjadi sebesar 2.410.050 jiwa.

Salah satu upaya yang mendapat perhatian dari pemerintah sebagai upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yaitu peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. Faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu

wilayah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi (Feriyanto, 2014: 43). Peningkatan PDRB suatu daerah bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Untuk melihat pertumbuhan PDRB provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel 1.2. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Harga Konstan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.2. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Harga Konstan

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2013	125.940.634	6,1
2014	133.340.836	5,9
2015	140.719.474	5,5
2016	148.134.244	5,3
2017	155.976.492	5,3
2018	163.995.268	5,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumbar Tahun 2019

Dalam rentang tahun 2013-2018, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat mengalami perlambatan. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi naik 5,9 persen dari tahun sebelumnya yaitu dari Rp. 125.940.634 juta tahun 2013 menjadi Rp.133.340.836 juta ditahun 2014 dan pada tahun 2018 menjadi 163.995.268 juta atau naik sebesar 5,3 persen dari tahun 2017. Namun laju pertumbuhan ekonomi di

Sumatera Barat mengalami penurunan jika dibandingkan kurun waktu tahun 2010-2015 yaitu mengalami peningkatan sebesar 6,1 persen.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, hal ini bisa dilihat pada tahun 2017 dimana ketika laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 5,3 namun penyerapan tenaga kerja malah menurun sebesar 0,1 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat. Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan upah minimum di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan 9 persen dibandingkan tahun 2017. Melalui peningkatan upah tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Tabel 1.3. Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat

Tahun	UMP (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2013	1.350.000	17
2014	1.490.000	10
2015	1.615.000	8
2016	1.800.725	12
2017	1.949.285	8
2018	2.119.067	9

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumbar Tahun 2019

Tingkat Upah di Sumatera Barat dalam periode tahun 2013-2018 cenderung mengalami kenaikan, jika dilihat pada tahun 2013 pertumbuhan upah sebesar 17 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 8 persen lalu pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 12 persen, dan pada tahun 2018 pertumbuhan upah di Sumatera Barat meningkat 9 persen atau sebesar 2.119.067 ribu rupiah.

Penelitian Rahmawati (2013) mengenai pengaruh investasi dan tingkat upah terhadap kesempatan kerjamenemukan bahwa tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Ketika upah meningkat sebesar 1 persen maka kesempatan kerja juga meningkat sebesar 1,604143961. Peningkatan upah ditandai dengan meningkatnya konsumsi para pekerja sehingga terjadi kenaikan permintaan barang dan jasa. Kenaikkan permintaan barang dan jasa akan menyebabkan produksi barang dan jasa perusahaan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah secara tidak langsung dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu dengan meningkatkan investasi untuk daerah tersebut, karena dengan meningkatnya investasi maka akan menimbulkan pembangunan ekonomi di daerah, dan dengan adanya pembangunan ekonomi maka permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat.

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian menurut Sukirno, (2012).

Bentuk investasi umumnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah/swasta dan investasi oleh pihak luar negeri. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta lebih dikenal dengan sebutan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sedangkan investasi dari pihak luar negeri dikenal dengan sebutan PMA (Penanaman Modal Asing). Dengan adanya investasi maka kapasitas dalam produksi akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi output yang dihasilkan. Meningkatnya output akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai, faktor investasi secara langsung dapat meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan meningkatkan permintaan faktor produksi, termasuk tenaga kerja.

Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.4 Nilai Investasi Rill Provinsi Sumatera Barat.

Table 1.4. Perkembangan Nilai Investasi Rill Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2013	1.009.883	21
2014	1.262.590	25
2015	3.224.830	155
2016	3.874.844	20
2017	1.711.390	-56
2018	2.327.530	36

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumbar Tahun 2019

Realisasi Investasi Provinsi di Sumatera Barat pada tahun 2013 sebesar Rp.1.009.883 Juta, lalu mengalami kenaikan sampai pada tahun 2015 menjadi Rp.3.224.830 Juta atau tumbuh sebesar 155 persen, namun pada tahun 2017 nilai investasi turun sebesar 56 persen dari tahun 2016 menjadi Rp.1.711.390 Juta, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 36 persen menjadi Rp.2.327.530 Juta.

Secara umum ada tiga persoalan yang menjadi penghambat investasi di daerah. Pertama izin investasi yang menyulitkan investor untuk melakukan investasi dimana investor harus temui Kepala Daerah terlebih dahulu sebelum izin dikeluarkan. Jika tidak, izin tak diberikan. Kedua, masih adanya regulasi daerah yang menghambat alih-alih memudahkan investasi. Terkait hal ini, Nasrul Abit menyatakan perlu dilakukan peninjauan terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk mempermudah investasi. Ketiga, perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi menyangkut Paket Kebijakan Ekonomi yang mengatur tentang investasi, serta

antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyangkut batas kewenangan masing-masing dalam pemberian izin investasi.

Permasalahan penghambat investasi sangat merugikan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi di Sumatera Barat. Lahan yang harusnya bisa dijadikan proyek investasi dibiarkan saja. Investasi memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak investasi yang masuk maka lapangan pekerjaan bertambah sehingga tenaga kerja yang menganggur dapat ikut andil dalam proyek investasi.

Dari fenomena di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Barat**”.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan pada latar belakang penelitian ini maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat?
2. Apakah upah minimum provinsi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat?
3. Apakah investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat?

4. Apakah produk domestik regional bruto, upah minimum provinsi dan investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis apakah upah minimum provinsi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis apakah investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis apakah produk domestik regional bruto, upah minimum provinsi dan investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai masukan dalam skripsi yang bersangkutan
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik tersebut.

- c. Bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dalam usaha untuk memperluas wawasan dan menambah daftar pustakanya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kampus

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para akademis sebagai penunjang pembuatan skripsi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh produk domestik regional bruto, upah minimum provinsi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menyelesaikan studi di jenjang Strata satu (1).